

**PENERAPAN SISTEM PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS
(AUTOMATIC EXCHANGE SYSTEM OF INFORMATION) DI INDONESIA
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT
KETERBUKAAN RAHASIA DATA DAN INFORMASI DI BIDANG
PERPAJAKAN DAN PERBANKAN**

Ida Ayu Septiani
(1487059)

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi sebuah tantangan yang cukup berat di Indonesia. Faktanya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam sebuah bank mendapatkan suatu perlindungan yang sifatnya pribadi. Perlindungan bank terhadap data nasabah bank tersebut dalam dunia perbankan dikenal sebagai prinsip rahasia bank. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai keterbukaan rahasia data dan informasi di bidang perpajakan dan perbankan yang disebut sebagai *automatic exchange system of information*. Penulisan skripsi ini membahas pengaturan dan perlindungan hukum terkait *automatic exchange system of information* di bidang perpajakan dan perbankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perpajakan dan perbankan. Perppu ini mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) dalam mendapatkan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak agar mencegah praktik penghindaran pajak, di sisi lain Perppu ini menerobos kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dengan adanya Perppu ini, dapat dengan mudah terjadi kebocoran rahasia data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Wajib Pajak, padahal kerahasiaan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak adalah hak privasi yang harus dilindungi.

Perppu ini bersifat *derogasi*, Perppu ini tidak menghapuskan keberadaan UU KUP dan UU Perbankan melainkan berjalan secara beriringan. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai pembukaan akses informasi perpajakan yang diatur oleh Perppu ini, maka peraturan yang diberlakukan secara spesifik adalah PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. Perppu ini belum mengatur secara khusus perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak. perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak masih mengacu pada UU KUP. Apabila Direktorat Wajib Pajak bertindak di luar kewenangan Perppu ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dilakukan atas pengaduan orang yang merasa haknya dilanggar.

Kata kunci: *Automatic exchange system of information*, rahasia bank, pajak

IMPLEMENTATION OF AUTOMATIC EXCHANGE SYSTEM OF INFORMATION IN INDONESIA AND LEGAL PROTECTION OF THE PUBLIC RELATED TO THE DISCLOSURE OF DATA AND INFORMATION SECRECY IN THE TAX AND BANKING SECTOR

Ida Ayu Septiani
(1487059)

ABSTRACT

Tax is one of the government policies in implementing national development. Efforts to increase tax revenues as a source of financing of the country's development are becoming a serious challenge in Indonesia. In fact there are still some challenges in the implementation of tax collection. One is the low level of public awareness in paying taxes so that it affects the low level of compliance in paying taxes. The wealth of the taxpayer stored in a bank obtains a personal protection. The bank's protection of the bank's customer data in the banking world is known as the bank's secret principle. However, the government issued a new policy on the disclosure of secret data and information in the field of taxation and banking, known as the automatic exchange system of information. This thesis discusses the regulation and legal protection related to automatic exchange system of information in the field of taxation and banking.

The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes legislation and conceptual approach. The research result shows that the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Interests regulates the authority of opening the confidentiality of financial access especially in the field of taxation and banking. This Government Regulation in Lieu of Law supports Law Number 6 Year 1983 regarding General Provisions and Tax Procedures as amended several times and the latest by Law Number 16 Year 2009 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 5 Year 2008 regarding the Fourth Amendment of Law Number 6 of 1983 on General Provisions and Procedures of Taxation into Law (General Tax Provisions and Procedures Law) in obtaining data and financial information of taxpayer customers in order to prevent the practice of tax avoidance, on the other hand this Government Regulation in Lieu of Law breaks through bank secrecy for tax purposes as regulated in Law Number 10 Year 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking (Banking Law). With the existence of this Government Regulation in Lieu of Law, can easily leak confidential data and financial information of taxpayer customers conducted by the Directorate General of Taxes, whereas the confidentiality of data and financial information of taxpayer customers is the right of privacy that must be protected.

This Government Regulation in Lieu of Law is a derogation, this Government Regulation in Lieu of Law does not eliminate the existence of General Tax Provisions and Procedures Law and Banking Law but runs in straight line. However, when there are specific issues regarding the opening of access to tax information regulated by this Government Regulation in Lieu of Law, then the regulation that is specifically applied is that the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017. This regulation does not specifically regulate the protection of data and information of the taxpayers' customers. the protection of the confidentiality of data and information of the taxpayer's customers still refers to the General Tax Provisions and Procedures Law. If the Directorate General of Taxes acts outside the authority of this Government Regulation in Lieu of Law, then a criminal sanction may be imposed on the complaint of a person who feels his rights have been violated.

Keywords: Automatic exchange system of information, bank secrecy, tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PENGATURAN PERPAJAKAN, KERAHASIAAN BANK, SERTA LEMBAGA JASA KEUANGAN DI INDONESIA TERKAIT PERTUKARAN INFORMASI

A. Bank sebagai Lembaga Keuangan dan Lembaga Intermediasi.....	29
B. Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Perbankan.....	36
C. Tinjauan Umum Pajak.....	50
D. Pengampunan Pajak	61

BAB III SISTEM PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS DALAM *AUTOMATIC EXCHANGE SYSTEM OF INFORMATION*

A. Sejarah Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (<i>Automatic Exchange System Of Information</i>)	64
B. Tinjauan Umum Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (<i>Automatic Exchange System Of Information</i>).....	66
C. Tinjauan Umum <i>the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i>	76
D. Tinjauan Umum <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i>	79
E. Dasar Hukum Perjanjian Internasional <i>Automatic Exchange of Information</i>	83
F. Pengaturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia.....	87

BAB IV	ANALISIS PENERAPAN SISTEM PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS (<i>AUTOMATIC EXCHANGE SYSTEM OF INFORMATION</i>) DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT KETERBUKAAN RAHASIA DATA DAN INFORMASI DI BIDANG PERPAJAKAN DAN PERBANKAN	
A.	Pengaturan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis Dalam <i>Automatic Exchange System of Information</i> di Bidang Perpajakan dan Perbankan sebagai Upaya Pencegahan Praaktik Penghindaran Pajak	94
1.	Prinsip Rahasia Bank terkait Kepentingan Perpajakan.	94
2.	Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (<i>Automatic Exchange System Of Information</i>) di Indonesia	114
B.	Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penerapan sistem pertukaran informasi otomatis dalam <i>automatic exchange system of information</i> di bidang perpajakan dan perbankan.....	128
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	SIMPULAN	137
B.	SARAN	141
	DAFTAR PUSTAKA	144
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
------------	---

